



Research Article

Antara Society dan Ummat; Sebuah Analisis Perbandingan Konsep

Fachri Khoerudin¹, Amir Reza Kusuma²

1. Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia; fachrikhoerudin34@gmail.com



2. Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia;

amirrezakusuma@mhs.unida.gontor.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by **MAQOLAT: Journal of Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : April 04, 2026

Revised : May 17, 2026

Accepted : June 11, 2026

Available online : July 12, 2026

How to Cite: Fachri Khoerudin, & Amir Reza Kusuma. (2026). Between Society and Ummah: A Comparative Analysis of Concepts. *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, 4(3), 204-221. <https://doi.org/10.58355/maqolat.v4i3.188>

Between Society and Ummah: A Comparative Analysis of Concepts

Abstract. Society has become a central theme that has gained attention in recent centuries. The West brought a positivistic paradigm to research society to science, by building methodologies so as to form its own paradigm in researching society. Because of that lack of value, some Muslim scholars feel the need to revisit some key concepts in social science that may be contrary to Islamic values. This short paper at least attempts to elaborate on what and how the concept of society as a term is often discussed in social science disciplines. Then look further as far as what the problems contained in the concept, and look for the equivalent of the concept in the Islamic religious tradition that is the ummah that is in accordance with the correct view of life. This paper attempts to justify by islamization so that science is always appropriate and based on the Islamic perspective, including in the description of the concept of the Last society in terms of change. The ummah will always change. The existence of the badawa theory and hadarah from Ibn Khaldun shows that. But the point of emphasis is, the concept of the ummah does not change completely, but changes in determination. In addition, the change of the

ummah is a change to achieve one goal. Different things with society that really changed completely according to the environment.

Keywords: Society, West, Ummah, Islam

Abstrak. Perbincangan masyarakat (*society*) menjadi tema sentral yang mulai mendapat perhatian dalam beberapa abad kebelakang. Barat membawa paradigma positivistik untuk meneliti masyarakat penelitian terhadap ilmu sains, dengan membangun metodologi sehingga membentuk paradigma tersendiri dalam meneliti masyarakat. Karena ketidak-bebasan nilai itu, beberapa cendekiawan muslim merasa perlu untuk meninjau kembali beberapa konsep kunci dalam ilmu sosial bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Makalah singkat ini setidaknya mencoba untuk menguraikan tentang apa dan bagaimana konsep *society* sebagai term yang sering kali diperbincangkan dalam disiplin ilmu sosial. Kemudian dilihat lebih lanjut sejauh apa problem yang terkandung dalam konsep itu, dan mencari padanan konsep dalam tradisi agama Islam yakni ummah yang sesuai pandangan hidup yang benar. Makalah ini mencoba untuk membenarkan dengan langkah islamisasi agar ilmu pengetahuan selalu sesuai dan berlandaskan cara pandang Islam, termasuk dalam penjabaran konsep *society* Terakhir dari segi perubahan. Ummat memang akan selalu berubah. Adanya teori badawa dan hadarah dari Ibnu Khaldun menunjukan hal itu. Tetapi yang menjadi titik tekan adalah, konsep ummat tidak berubah secara total, tetapi berubah dalam ketetapan. Selain itu, perubahan ummat merupakan perubahan untuk mencapai satu tujuan. Berbeda hal nya dengan *society* yang benar-benar berubah sepenuhnya sesuai dengan lingkungan

Kata Kunci: Society, Barat, Ummah, Islam

PENDAHULUAN

Perbincangan tentang siapa dan apa itu masyarakat (*society*) menjadi tema sentral yang mulai mendapat perhatian dalam beberapa abad kebelakang. Sejak August Comte membawa paradigma positivistik untuk meneliti masyarakat layaknya penelitian terhadap ilmu sains, para ilmuwan lain membuka jalur baru dengan membangun metodologi sehingga membentuk paradigma tersendiri dalam meneliti masyarakat. (Muslih 2016:149-50) Munculnya pendekatan baru terhadap disiplin ilmu sains sosial seperti fenomenologi, hermeneutika, teori kritis dan lainnya semakin memperkaya ragam pendekatan untuk melihat masyarakat. (Muslih 2016:150) Tapi menariknya, selain metode positivistik, mereka mengingkari anggapan peneliti mesti menjaga jarak dengan objeknya (masyarakat). (Happy Susanto 2014:97-104) Artinya, dalam setiap teori yang mereka buat, ada nilai-nilai yang menjadi basis dari cara pandang mereka. Sudut pandang ilmu-ilmu keislaman tersebut berbeda dengan sudut pandang ilmu sosial modern. Bagi ilmu-ilmu keislaman, konteks sosial dikaji dalam rangka memahami kehendak Tuhan yakni apa kiranya dimaksud oleh teks Al-Quran dan Hadist. (Mujiburrahman 2017:55)

Karena ketidak-bebasan nilai itu, beberapa cendekiawan muslim merasa perlu untuk meninjau kembali beberapa konsep kunci dalam ilmu sosial. Hal ini diamini oleh Ilyas Ba Yunus dan Farid Ahmad ketika menganggap sosiologi tak mungkin lepas dari nilai-nilai yang menjadi basis dalam cara pandang mereka terhadap objek pengetahuan, yang bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. (Ilyas Ba Yunus dan Farid Ahmad 1991:54) Begitu juga dengan Zaman ketika menganggap pengkajian ilmu sosial sebagai pengganti agama untuk menjawab pertanyaan esensial tentang individu dan masyarakat. (See Hoon Peow 2010:94) Oleh karena itu, cendekiawan

semisal Jamil Farooqi, (Ibrahim A Ragab 1999:27-52) Ibrahim Raghieb, (Jamil Farooqi dalam Mohd Yusof Hussain 2009:148) Murthada Muttahari dan lainnya menganggap perlu melakukan islamisasi terhadap beberapa konsep, bahkan bangunan metodologi penelitian ilmu sosiologi itu sendiri. Termasuk, ketika berbincang tentang konsep *society* yang *notabene* merupakan objek kajian dari ilmu sosiologi.

Konsekuensi lainnya adalah Islam sebagai agama yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan Barat pasti memiliki sebuah konsep tersendiri. See Hoon Peow mengajukan term *ummah* sebagai alternatif lain untuk menggambarkan sebuah hubungan makro di antara manusia, (See Hoon Peow 2010:98) Ini juga disetujui Deniese L Carmody, sambil menyebut *ummah* yang ideal dalam agama Islam memiliki kesatuan pada seluruh aspeknya sehingga tidak dipisahkan antara urusan dunia (*secular spheres*) dan akhirat (*religious*). (Denise L. Carmody dan T.L Brink 2014:336) Apabila Barat menggunakan *society* (atau *community*), maka Islam menggunakan kata *ummah*. Kedua term ini memiliki dasar yang berbeda, sehingga pasti memiliki konsep yang berbeda pula. Hal ini yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Makalah singkat ini setidaknya mencoba untuk menguraikan tentang apa dan bagaimana konsep *society* sebagai salah satu term yang sering kali diperbincangkan dalam berbagai disiplin ilmu sosial, terutama disiplin ilmu sosiologi. Kemudian akan dilihat lebih lanjut sejauh apa problem yang terkandung dalam konsep itu, dan mencari padanan konsep dalam tradisi agama Islam –yakni *ummah*- yang sesuai dengan pandangan hidup yang benar. Langkah-langkah ini merupakan salah satu tahapan awal islamisasi agar ilmu pengetahuan selalu sesuai dan berlandaskan cara pandang Islam, termasuk dalam penjabaran konsep *society*.

METODE PENELITIAN

Metode

Makalah mencoba untuk menguraikan tentang apa dan bagaimana konsep *society* sebagai salah satu term yang sering kali diperbincangkan dalam berbagai disiplin ilmu sosial, terutama disiplin ilmu sosiologi. Kemudian akan dilihat lebih lanjut sejauh apa problem yang terkandung dalam konsep itu, dan mencari padanan konsep dalam tradisi agama Islam –yakni *ummah*- yang sesuai dengan pandangan hidup yang benar. Langkah-langkah ini merupakan salah satu tahapan awal islamisasi agar ilmu pengetahuan selalu sesuai dan berlandaskan cara pandang Islam, termasuk dalam penjabaran konsep *society*.

Dalam tulisan ini penulis mencoba memperbandingkan kedua konsep tersebut. Dipilihnya kedua teori paling tidak sudah memenuhi syarat kesebandingan (*komparability*) yaitu dari segi objeknya teori tersebut memiliki kesamaan objek yaitu mengkaji induktif Komparasi dengan langkah-langkah prosedural sebagai berikut (a) Penggalan Data, yaitu dengan cara membaca berbagai literatur; (b) Deskripsi Data, yaitu menyaji semua data yang diperoleh dalam bentuk teks atau uraian; (c) Interpretasi, setelah data disajikan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menganalisis data yang telah tersaji; (d) Komparasi Awal, yaitu menentukan hal-hal apa saja yang harus dikomparasikan, (f) Komparasi final, yaitu menganalisa secara cermat dan mendalam sehingga menemukan sisi persamaan dan perbedaan

HASIL PEMBAHASAN

Mencari Makna *Society* Dalam Tinjauan Bahasa

Secara etimologi, *society* diambil dari bahasa latin *societat*, *societas* sedang dalam bahasa Prancis disebut *socius* (*companion*). Ada beberapa konotasi bagi penggunaan *society*, yakni *pertama* diartikan sebagai perkawanan (*companionship*), *kedua* assosiasi sukarela dari berbagai individu untuk meraih tujuan bersama, *ketiga* bagian dari komunitas yang bergerak bersama karena kesamaan kepentingan dan standar. (Jhon M. Morse etc 2004:682) Selain itu, *society* juga bermakna sekelompok manusia yang setidaknya memiliki kesatuan yang tetap dan tersusun dalam sebuah aktifitas kolektif atas adanya perasaan yang sama dimana mereka dapat bersatu. (Kartasapoetra dan Hartini 2007:235)

Sedangkan secara termologi, para ahli berbeda pendapat apa sebenarnya yang dimaksud dengan *society*. Jhon Rawls misalnya, Ia mendefinisikan sebagai sebuah asosiasi yang -kurang lebih- bersifat independen (*self sufficient*), yakni sejumlah orang yang dalam hubungannya antara satu dan lainnya mengakui aturan perilaku tertentu sebagai sesuatu mengikat. Sebagian besar di antara mereka bertindak sesuai dengan aturan tersebut. (Mark Jensen 2011:11) Definisi Rawls ini tidak menjelaskan sejauh mana batasan dalam *society*. Tetapi dalam kesempatan lain Ia memperjelas batasan *society* meliputi gagasan dari masyarakat yang independen dalam sebuah negara (*the boundaries of a society are given by notion of a self contained national community*) pada akhirnya, Ia memungkirkan kontribusi pihak lain dalam sebuah *society*, karena *society* dibangun atas dasar kepentingan dan keuntungan. (*a closed system isolated from other societies is a cooperative venture and mutual advantage*) (David Copp 1992:185)

Apabila berkaca dari definisi Rawls, tampak *society* lebih dimaknai sebagai sesuatu yang tertutup hanya dalam satu negara (*nation or state*), berdasar interest dan berdikari dalam pelaksanaannya. Ini yang dikritik oleh David Copp yang menggagap definisi dari Rawls masih tidak jelas dan tidak mencakup semua variable dari konsep *society*, terutama ketika Rawls selalu mengatakan *self sufficient* sebagai bagian tak terpisahkan dari definisi sebagai hasil dari cara pandangannya terhadap konsep keadilan sebagai *previllage* bagi setiap individu. (David Copp 1992:185) Lewat “tangan” Mayhem, Ia menjabarkan “definisi analitis biasanya memperlakukan masyarakat sebagai populasi yang memiliki tingkat independensi yang relatif dan berdikari, dicirikan oleh organisasi internal, teritorial, kekhasan budaya, dan rekrutmen seksual. Definisi spesifik sangat bervariasi dalam hal elemen mana yang ditekankan” (Leon H Mayhew 1968:577)

Pada akhirnya Ia mengajukan berbagai definisi dari kalangan sosiolog yang menurutnya lebih membantu untuk menemukan arti dari *society*. Copp mengajukan penjabaran dari Aberle ketika menyatakan *society* bukan sebuah sistem tertutup yang hanya dibatasi sebuah teritorial negara, atau dikaitkan dengan satu negara tertentu. Ia mengatakan “dua atau lebih *society* mungkin memiliki kultur yang sama, atau setidaknya kultur yang mirip”. (David Copp 1992:186) Oleh karena itu Ia mencontohkan kasus kota dan negara Yunani adalah *society* yang terpisah, meski

kultur mereka sangat mirip. ketidak terbatasan teritorial negara sebagai wadah bagi *society* yang dijelaskan Aberle semakin menjelaskan titik perbedaan antara dirinya dengan Rawls.

Definisi lainnya datang dari Parson. Ia mengajukan tiga pemaknaan. *Pertama*, *society* diartikan sebagai salah satu jenis dari berbagai elemen sistem sosial yang mana Ia mencapai tingkat keindependenan tertinggi sebagai sistem dalam hubungannya dengan lingkungannya. (Talcott Parson 1966:9) *Kedua*, sebuah sistem sosial yang telah memenuhi pra-syarat fungsional jangka panjang dari dalam sumber dayanya sendiri. *Ketiga*, dalam karyanya yang lain Parsons mendefinisikan *society* sebagai sebuah kolektif sistem budaya tertentu yang telah diinstitusionalikan, tetapi masih merupakan bagian dari kolektif yang lebih tinggi (sub-system) yang memiliki nilai-nilai yang lebih fungsional dan penting. (David Copp 1992:189) Ketiga definisi itu kembali menekankan aspek indepedensi dan kesepakatan atas nilai fungsional sebuah komunitas sebagai ciri khas dari *society*, apalagi merujuk pada definisi yang ketiga.

Sedangkan Karl Marx mendefinisikan masyarakat sebagai struktur yang di dalamnya terdapat kesenjangan dan ketegangan akibat konflik antara kelas sosial sebagai efek dari pembagian nilai-nilai ekonomi yang tidak merata di dalamnya. (Elly M Setiadi dkk 2015:34) Marx dalam konteks ini melihat masyarakat dari sudut pandang sturktural dan diferensiasi kelas sosial. Berbeda dari definisi sebelumnya yang menitik beratkan pada keindependenan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Dari sekian banyak definisi kita dapat menyimpulkan bahwa pendefinisian para sosiolog atas *society* tidak selamanya sama dan berubah-ubah tergantung dia memandang dari mana. Hal ini juga di amini oleh Elly yang mengatakan bahwa tidak ada definisi tunggal dalam masyarakat karena sifat manusia dalam sebuah kelompok itu dinamis dan berubah-ubah setiap waktu. (Elly M Setiadi dkk 2015:35) Tetapi pada akhirnya Ia menarik beberapa benang merah dari banyak definisi di atas untuk menjabarkan apa arti dari masyarakat, yakni *pertama* sekelompok manusia yang tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama. *Kedua*, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya. *Ketiga*, memiliki keinginan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati. Ia juga memberi tambahan syarat bahwa akibat dari kesamaan visi dan menetap di satu wilayah dengan jangka waktu yang lama, maka akan membentuk budaya tersendiri meliputi sistem nilai, pengetahuan dan sebagainya. (Elly M Setiadi dkk 2015:38)

Konsep Society

Tentu ada hubungan antara *society* dalam pandangan Barat dengan nilai yang mereka anut. Mungkin tolak ukurnya adalah budaya yang mereka yakini dan jalankan. Meski begitu, menurut Parson, term *society* digunakan untuk merujuk pada hubungan sistem secara spesifik atas interaksi antara individu dan kolektif. (Nevitt Sanford 1966:219) Dalam artian, masyarakat sendiri yang menghasilkan kultur, lalu menjadi keyakinan dan basis bagi setiap gerak mereka. Sebagai contoh, Madzhab Frankfurt –yang diwakili Habermas- memandang nilai masyarakat, terutama masyarakat modern sudah terintegrasi dengan nilai-nilai kapitalis, sehingga manusia

bukan lagi sebagai makhluk yang bebas. Dalam kata lain, kesadaran masyarakat tentang nilai yang mereka anut merupakan *psudo-consciousness* hasil rekayasa kaum kapitalis. Dalam titik ini, Ia mewarisi semangat Marx tentang penghancuran ideologi dan kelas sebagai kesadaran palsu dari masyarakat. (Budi F Hardiman 2015:231)

Lebih lanjut, teori kritis juga mengambil jalan tengah terkait kontributor bagi terbentuknya dan perubahan nilai sebuah *society*. Di satu sisi mereka tidak memungkirkan atas basis material seperti basis ekonomis, politis dan sosial ketika struktur keadilan dan kesamaan hak antar anggota masyarakat dikonsensuskan sehingga disepakati nilai tertentu. Tetapi di sisi lain, teori kritis juga mempersyaratkan kesadaran nyata lewat komunikasi dan dialog yang liberatif antar individu dalam sebuah masyarakat. (Mudji Sutrisno dkk 2005:68-69) Apa yang dilakukan oleh pemikir madzhab Frankfurt ini mengindikasikan bahwa nilai yang tertanam di masyarakat erat kaitannya dengan ideologi yang membentuk kesadaran, atau bahasa Foucault *episteme*, selain faktor material seperti ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Tetapi semua itu tidak terlepas dari kata kesepakatan. Apalagi jika melihat sistem masyarakat modern di mana nilai kesepakatan menempati tempat paling tinggi. Setidaknya pemaparan J.J Rosseau dapat menjadi acuan ketika merumuskan tentang kesepakatan –Ia menyebutnya dengan kontrak sosial- sebagai basis bermasyarakat. Bagi Rosseau, syarat untuk terciptanya kesetaraan dalam kehidupan masyarakat apabila kontrak sosial dipahami dengan baik. Pendapat ini diperjelas oleh A Suhelmi ketika menjabarkan bagaimana kontrak sosial merupakan asas bagi masyarakat modern jika ditarik pada konteks negara. *Pertama*, kedaulatan negara merupakan sebuah produk dari proses perjanjian utama dalam masyarakat bukan *taken for granted*. Sehingga politik dimaknai sebagai sekuler seluruhnya, *Kedua*, dunia mesti dikuasai oleh hukum yang didasari oleh kodrat yang mengandung keadilan universal. *Ketiga*, kedaulatan negara berasal dari rakyat maka harus ada jaminan atas hak-hak individu dalam masyarakat. (Ahmad Suhelmi 2007:297) Berdasarkan ungkapan di atas, kontrak sosial adalah identitas dalam konsep *society* Barat yang bukan hanya sekedar berlaku pada seluruh elemen kehidupan. Atas dasar kesepakatan-kesepakatan masyarakat itulah nilai sebuah masyarakat terbentuk.

Selanjutnya tentang asas yang membentuk *society*. Terkait dengan ini, menarik apabila kita menyimak apa yang dikatakan oleh Fairchild ketika mengatakan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang saling bergerak, bekeja sama dalam mengejar beberapa kepentingan prioritas mereka, termasuk kepentingan untuk menjaga diri dan kelestariannya. “*Society is a group human beings cooperating in the pursuit of several of their mayor interest, in variably including self maintenance and self perpetuation.*” (Elly M Setiadi 2006:80) Ungkapan ini menunjukkan bahwa asas *interest* dalam konsep *society* tidak bisa dipisahkan sama sekali. Asas kebersamaan karena ada kepentingan, baik materi dan non materi. Kesamaan kepentingan ini menjadi salah satu tolak ukur batasan dari konsep *society*.

Asas inilah yang tampaknya lebih dekat untuk membatasi arti dari *society*. Selama mereka punya kepentingan bersama yang terwujud dalam aturan untuk mempertahankan kehidupan dan tinggal di sebuah wilayah dengan waktu yang lama maka terkategori sebagai *society*. Namun yang menjadi masalah adalah,

sejauhmana batasan dari satu *society* ke *society* lainnya? Karena penggunaan istilah *society* selalu bervariasi sepanjang abad ke 20 misalnya masyarakat binatang, masyarakat primitif, masyarakat sipil, masyarakat nasional, masyarakat politik, masyarakat kelas atas dan lain sebagainya. (William Outhwaite 2002:820-21) Pengkategorian ini dikarenakan ada kepentingan dan perasaan bersama dalam sebuah wilayah.

Untuk menjawab pertanyaan ini, David Copp menjelaskan perlu ada pembatasan dan pembedaan antara pengkategorian masyarakat dengan negara atau dengan nasionalisme agar kita mendapatkan jawaban yang jelas. (David Copp 1992:187) Satu negara, seringkali memiliki dua atau lebih *society*. Karena banyak yang merasa tidak *in group* meski berada dalam satu negara yang sama. Lantas, Ia mengajukan kesimpulan tentang *society* akan eksis apabila terdapat populasi sosial di mana interaksi mereka didasarkan pada konsep kepentingan kebutuhan material dan prioritas hidup. Untuk memahami konsep *society*, kita perlu memperhatikan tiga istilah yakni populasi sosial (*social population*), standar perilaku yang interaktif – untuk memenuhi kepentingannya- (*standars of interactive population*) dan nilai budaya (*cultural values*). (David Copp 1992:207) Itulah yang menjadi basis teritorial sebuah *society*, yakni adanya kesepakatan atas ketiga hal itu, bukan negara. *Society* dipadang sebagai hal yang alamiah dan tidak perlu dideterminasi lewat teritori, ras budaya dan sebagainya. (David Copp 1992:188)

Selanjutnya berbicara tentang konsep *society* juga pasti berbicara tentang fokus perkembangan dan perubahan sosial. Masalahnya, bukankah pendefinisian *society* terus menerus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman? Ini yang dikemukakan oleh *Society* selalu berganti setiap saat lewat angka kelahiran dan kematian atau migrasi dari kelompok yang lain. Adanya pengaruh dari luar dari kelompok yang lain juga mengakibatkan modifikasi model lama. Karena perubahan itu, ada yang berkembang, ada yang berubah ada juga yang malah hancur dan digantikan oleh model *society* yang baru. Jadi, ketika bertanya tetap dan berubahnya sebuah masyarakat, ada banyak faktor untuk menjelaskan ke arah sana. (David Copp 1992:185)

Karl Marx misalnya membagi perubahan masyarakat ke dalam beberapa tahapan sejarah tergantung pada kondisi material dan cara cara produksi di satu pihak dan hubungan-hubungan sosial serta norma-norma kepemilikan di lain pihak. Tahap perubahan *society* dalam pandangan Marx dari mulai primitif, komunal purba, feodal, borjuis, kapitalis hingga akhirnya berujung pada masyarakat komunis sebagai puncak dari perubahan masyarakat.¹ Dalam pandangannya, sudut pandang perubahan masyarakat difokuskan pada sistem kelas dan relasi produksi.

Pada sisi lain, August Comte memandang perubahan masyarakat dari aspek relasi mereka dengan alam. Ia menjadikan fenomena masyarakat layaknya fenomena alam pada umumnya. Ia Menerapkan hukum tiga tahap sebagai basis perubahan, yaitu berawal dari tahap teologi, metafisik dan positif. (Herabudin 2015:225) Bagi Comte, masyarakat tak ubahnya organ tubuh yang dapat diteliti secara pasti lewat

¹ (Etc 2016:47)

metode observasi saintifik, satu hal yang nanti diingkari oleh Dilthey dan generasi sesudahnya.

Penjelasan lebih lanjut tentang basis dalam penelitian sosial bisa dilihat dari asumsi Durkheim tentang pada realitas sosial ada sebagian kesadaran kolektif yang mengatur dan mengarahkan individu. Ia beranggapan masyarakat itu sendiri bersifat objektif (*objective facticity*) dan juga mengandung makna-makna yang subjektif (*subjective meaning*). Berger, memadukan keduanya sebagai teori konsturksi sosial ia mengatakan *society is a human product, society is an objective reality*. Sebagai kenyataan objektif masyarakat berada di luar diri manusia dan berhadap-hadapan dengan realitas itu dan sebagai kenyataan subjektif, individu berada di dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan. Artinya, dalam pandangan Berger, individu berada dalam masyarakat dan masyarakat pembentuk individu. (Bagong Suyanto 2015:232) Tampak, corak Berger lebih dekat ke aliran fenomenologi dalam memandang masyarakat, termasuk perubahan-perubahannya.

Dari penjabaran di atas, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa perubahan dan perkembangan *society* dalam pandangan sosiologi Barat hanya berkisar pada aspek-aspek materialnya. Sedang nilai, moral dan budaya berkembang hanya mengikuti aspek-aspek materi. Ini yang dikatakan oleh Jamil Farooqi sebagai *"the normative system, according to western sociological knowledge, is subjected to material changes. It undergoes change when there is a drastic change in other aspects of life"*. Kajian barat, hanya sebatas pada sistem normatif yang hanya berfokus terhadap aspek-aspek materi. (Jamil Farooqi dalam Mohd Yusof Hussain 2009:148)

Definisi Umat Sebagai Padanan Kata *Society*

Apabila kita melihat penggunaan term *society* dalam perspektif Islam, maka istilah yang paling mendekati adalah umat. Meski apabila ditelusuri lebih dalam, terdapat perbedaan mendasar antara istilah umat dengan *society*. Oleh karena itu kita perlu melihat definisinya terlebih dahulu sebelum menjabarkan konsep, agar diketahui mana titik perbedaan dan persamaan antara umat dalam konsepsi Islam dan *society* dalam konsepsi Barat.

Secara bahasa, Ibnu Mandzur mengartikan ummat sebagai "ikatan hubungan di antara orang-orang". (Ibnu Mandzur 1414:26) Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Shahib bin 'Ibad dengan mendefinisikan umats secara bahasa dengan "jejak atau jalan dalam sebuah agama" atau "setiap generasi dari manusia". ('Ibad n.d.:487) kata *الامة* dalam bahasa arab memiliki jama' *الامم* meski umat itu sendiri merujuk pada satu entitas yang tidak tunggal. ('Ibad n.d.:487) Sebenarnya kata umat sendiri memiliki makna yang banyak, tergantung dalam konteks apa ia sedang dibicarakan. Menarik jika kita melihat Ibnu Atsir mengumpulkan banyak hadis yang memiliki kata umat lalu diartikan secara satu persatu. Ada yang berarti sendiri dalam agamanya (umat di sini tak banyak, tunggal), ada yang berarti mahluk (manusia dan binatang), ada juga yang berarti kesatuan dalam segi apapun, dengan kalimat *ummatan wahidatan* dan makna-makna lainnya. (Ibnu Atsir al-Jazari 1979:68)

Sedangkan menurut Istilah, para ulama berbeda dalam mendefinisikan apa arti umat. Raghīb al-Asfahani misalnya, ia mengartikan umat dengan "setiap perkumpulan manusia yang diikat oleh satu keyakinan (agama), satu waktu atau satu

tempat. Sama saja apakah ikatan itu meliputi makhluk yang *tashkhir* (binatang dll yang tidak punya daya memilih) atau makhluk yang *ikhtiyar* (manusia, bisa memilih mana yang baik dan salah). (Ar-Raghib Al-Asfahani 1412:86)

Definisi dari Raghib al-Asfahani ini menarik untuk dicermati ketika Ia memasukan unsur kesamaan agama sebagai identitas utama ketika mendefinisikan umat. Raghib juga memasukan unsur *ikhtiyar*, sebagai padanan kata *interest* yang kita temukan dalam kata *society*. Tetapi berbeda dengan kedua konsep itu, *Ikhtiyar* sebagaimana menurut al-Attas merupakan derivasi dari kata *khair* yang berarti kebaikan. (Syed Muhammad Naquib Al-Attas 1995:33) Asas kepentingan yang tercermin dari berkehendak masyarakat dalam Islam tidak didasarkan atas pilihan pada kejelekan yang bertentangan dengan agama, meski itu disepakati oleh kumpulan masyarakat yang hidup pada saat itu.

Selain Raghib al-Asfahani, Muhammad Abduh juga ikut mendefinisikan apa yang dimaksud dengan umat. Tetapi penjabarannya lebih mengarah ke posisi umat sebagai unsur dari Jama'ah. Ia mengatakan "*perlu diketahui bahwa kata umat itu lebih khusus daripada jama'ah, dimana umat merupakan salah satu unsur dari bangunan konsep jama'ah yang tersusun dari orang-orang yang memiliki pertalian yang mengikat satu sama lain dan saling memiliki kesatuan perasaan yang menjadikan mereka layaknya anggota badan dalam tubuh manusia*". (Muhammad Rasyid Ridha 1990:30) Lewat definisi Abduh, kita dapat mengetahui bahwa kesatuan perasaan merupakan unsur terpenting dalam umat. Selain itu, ternyata umat merupakan salah satu unsur dari bangunan besar yang bernama al-Jama'ah. Jika umat merupakan padanan dari *society*, lantas apa unsur lain yang membangun bangunan konsep al-Jama'ah dalam Islam?

Mengenai hal ini, Shidiq Amin menjabarkan tentang pilar-pilar al-Jama'ah. Ia menyebut setidaknya ada tiga pilar yang membangun sebuah jama'ah, yakni umat, imamah dan syura'. (Shiddiq Amien dkk 2005:16-50) Tentu, semua konsep ini (baik itu umat, imamah dan syura') didasarkan pada al-Quran dan sunnah sebagai cara dan jalan hidup bagi seorang muslim. Kesimpulannya, umat dalam pandangan Islam merupakan kunci utama dari pilar yang membentuk jama'ah. Tanpa adanya kejelasan dan keberadaan umat, mustahil satu jama'ah bisa tegak berdiri.

Pendefinisian lebih sederhana datang dari al-Qaffal sebagaimana yang dikutip Fakhruddin ar-Razi, ketika menyebut umat sebagai sebuah kaum yang berkumpul berdasarkan atau karena sesuatu yang sama sehingga mengikat antara satu dengan lainnya. (Fakhruddin ar-Razi 1420:327) Pendefinisian ini tampak lebih mengarah pada aspek keseragaman kepentingan ketimbang batas wilayah. Umat, dalam konteks ini dimaknai sebagai komunitas yang terikat, yang dalam definisi *society* diekspresikan dengan dibuatnya aturan atas dasar kesepakatan. (Fakhruddin ar-Razi 1420:327) Tentu, Fakhruddin mendasarkan kesepakatan itu bukan melibatkan antar manusia semata, tetapi kesepakatan berdasarkan keimanan dan tauhid. Ini dapat diketahui dari penjabarannya tentang surat al-Baqarah ayat 327.

Berdasarkan penjabaran definisi di atas, kita dapat mengetahui bahwa ada titik persamaan antara *society* dengan *ummah* hasil dari uraian secara definisi. Meskipun itu tidak memungkiri terdapat juga beberapa perbedaan mendasar dari keduanya, seperti kata *ikhtiyar* dari al-Asfahani yang berasaskan kebaikan, kata *jama'ah* dari

Abduh sebagai batasan siapa saja yang dapat disebut umat dan *mengikat* dari al-Qaffal sebagai wujud dari bergerak berdasarkan aturan berasaskan ketentuan dari Allah SWT.

Konsep Umat

Sebelum berbicara lebih jauh tentang seperti apa konsep umat, menarik apabila kita mencermati bagaimana karakteristik umat dalam agama Islam. Hayyatullah Laluddin dalam pemaparannya menyebut ada beberapa karakteristik umat sebagai padanan kata dari *society* yaitu, tauhid, kesatuan dan persaudaraan, kebenaran dan keseimbangan, masyarakat Islam sebagai prototype dari *society*, aspek alamiah manusia yang meliputi faktor internal dan internal umat. (Hayatullah Laluddin 2014)

Faktor pertama, Tauhid merupakan asas dari setiap tindakan manusia, termasuk dalam bermasyarakat. Sedangkan kesatuan dan persaudaraan menjelaskan tentang batasan dan cakupan dari umat yang tidak mengenal negara, ras, wilayah ataupun pembatas lain. Dalam konsep umat, *in group* di ukur lewat kesatuan agama Islam. Keseimbangan-kebenaran tercermin dari karakter Islam sebagai agama yang *washathan* terbebas dari ekstrimisme apapun juga tidak tunduk sepenuhnya pada kesepakatan dan fenomena sosial tanpa mengindahkan aturan tuhan. Lalu Islam sebagai prototype tercermin dari anggapan *khairu ummat* yang bisa menjadi role model bagi *society* lainnya. Sedang yang terakhir menunjukkan masyarakat islam tidak melulu membicarakan soal aspek eksternal berupa materi, tetapi juga berbicara tentang aspek internal yang meliputi ruh, aql, keimanan, spiritual dan lainnya sebagai bahasan utama melebihi aspek material.²

Ibnu Khaldun, salah seorang tokoh Islam yang disebut sebagai pelopor ilmu sosiologi, menyebut beberapa karakteristik dari sebuah *society*. Tentu, term umat masuk juga dalam pemaparan Ibnu Khaldun. *Pertama*, masyarakat secara keseluruhan bukan individu, merupakan kekuatan penting untuk pertahanan diri pada manusia dan elemen fisiknya. *Kedua*, masyarakat mesti memiliki pemimpin atau aturan sebagai kontrol sosial. *Ketiga*, aktifitas utama untuk kesejahteraan masyarakat adalah distribusi diantara orang-orang yang ahli dibidangnya. *Keempat*, fungsi masyarakat secara keseluruhan akan tercipta dengan jalan kerja sama, karena eksistensi manusia tidak akan pernah tercipta dan hidup kecuali melalui organisasi sosial dan kerjasama. *Kelima*, masyarakat mesti memiliki batas teritorial bersama yang disepakati. *Keenam*, kultur itu dibentuk oleh masyarakat. *Ketujuh*, rasa kepemilikan terhadap masyarakat mesti ada. Ibnu Khaldun menyebut ini dengan Ashabiyyah. (Fuad Baali 2001:31-32)

Karakter yang lebih sederhana juga diungkapkan oleh Shiddiq Amin yang mengungkapkan bahwa umat memiliki karakteristik (a). Selalu beramar ma'ruf nahyi munkar, (b). Iltizam dengan al-Haq, (c). Tidak durhaka kepada Rasulullah SAW. (Shiddiq Amien dkk 2005:29-31) Kemudian Ia juga mengutip pendapat Raghīb al-Asfahani bahwa dalam Islam, umat itu memiliki dimensi koresponden antara ilmu dan amal sehingga menjadi contoh untuk yang lainnya. Lebih lanjut, Raghīb mengatakan "kata umat dalam Ali Imran 104 meliputi segolongan manusia yang

² Ibid, point di atas merupakan intisari dari artikel Hayatullah Laluddin.

memiliki kehendak untuk memilih (*yatakhayyaruna*) memperdalam ilmu dan beramal shaleh agar mereka menjadi uswah bagi yang lain". (Ar-Raghib Al-Asfahani 1412:86) Kehendak memilih baik, keilmuan, pengamalan dan uswah bagi yang lain merupakan kata kunci dari karakteristik umat dalam pandangan Ar-Raghib.

Masuk ke dalam konsep, pertama-tama memperbincangkan tentang pembentukan nilai dalam *ummah*. Tentang hal ini, menarik jika kita melihat komparasi antara pembentukan nilai dalam *society ala* Barat dengan konsep umat dalam Islam. Jamil Farooqi memberi catatan merah terhadap konsep Society Barat. Ia mengatakan:

"Society its mean, a mechanism to achieve the ideals and not an end itself. It is an effect and not the cause. Norms, values and virtues of Islam are not at all created by society but are created by God, the Creator of the universe and human beings, revealed through the book and practiced by the prophet Muhammad SAW. They cannot change with the change in material conditions instead, material conditions have to be molded according to them. (Jamil Farooqi dalam Mohd Yusof Hussain 2009:149) (Masyarakat bermakna sebuah mekanisme untuk mencapai cita-cita namun berhenti pada dirinya sendiri. Segala eksistensi masyarakat merupakan akibat, bukan penyebab. Norma, nilai dan keutamaan Islam sama sekali tidak diciptakan oleh masyarakat tetapi diciptakan oleh Tuhan, Pencipta alam semesta dan manusia, diwahyukan melalui kitab dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak dapat berubah dengan perubahan kondisi material, sebaliknya, kondisi material harus dibentuk sesuai dengan mereka)". Dengan bertujuan untuk hidup rukun dengan kondisi dimana masyarakat dari golongan manapun dapat hidup berdampingan dan saling menjaga kebersamaan. (Mohammad Taqdir 2018:80)

Pernyataan ini diperkuat oleh Muttahari yang mengkritik bagaimana konsep masyarakat dalam pandangan Barat berasaskan sesuatu yang benar-benar rapuh. Alasannya sederhana, karena nilai yang diberlakukan masyarakat tidak berasaskan pada sesuatu yang tetap, seperti apa yang ada dalam Islam. Keyakinan terhadap Tuhan atau pendirian agama yang kuat tidak lantas menjadikan masyarakatnya menjadi kuat. (Sulfan Akilah Mahmud 2018:272) Yang menjadi masalah adalah, jika masyarakat tidak dibangun atas nilai yang tetap maka berarti mereka terbangun dengan nilai rapuh yang terus menerus berubah.

Sebenarnya, Islam tidak memungkiri konsensus atau kesepakatan di antara masyarakat yang menjadi salah satu unsur dari konsep *society*. Tetapi, ikatan dan kesepakatan itu mesti tidak dianggap alamiah begitu saja. Dalam hal ini al-Maududi menganggap bahwa umat Islam sebagai umat terpilih mesti menyerahkan dan membebaskan semua ikatan kecuali hanya kepada Allah. Tipologi masyarakat seperti itu akan menjadikan mereka sebagai masyarakat yang bebas dan sederhana.³

³ Muhammad Hedayatul Islam dan Fadzli Adam, "Islamization of Family and Society: Study of Bangladesh Jema'at El-Islami," Proceedings of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management, no. 23-24 November (2019): 85.

Kesepakatan dengan nilai yang tetap, berasaskan wahyu inilah yang membedakan Islam dengan masyarakat lainnya. Tentang hal ini, ada ungkapan menarik dari Hodgson ketika Ia menyatakan:

Islam telah terbukti konsisten dengan bentuk dan standar sosial yang sangat berbeda dari yang ada di wilayah inti Irano-Semit pada Periode Pertengahan. Oleh karena itu, kita harus melihat kontraktualisme Islam bukan sebagai hasil dari agama Islam (saja) tetapi sebagai kecenderungan yang paralel dengan moralisme Islam itu sendiri, meskipun mungkin tidak dapat direalisasikan tanpa dukungan Islam (*Islam has proved consistent with quite different social forms and standards from those of the Irano-Semitic core area in the Middle Periods. Accordingly, we must see Islamic contractualism not as the result of Islam but as largely a tendency parallel to that of Islamic moralism itself, though perhaps unrealizable without the support of Islam*)” (Armando Salvatore 2016:281)

Ungkapan Hodgson tersebut, meski terdapat beberapa kekeliruan dengan menyebut kontraktualisme masyarakat bukan berasal dari Islam, tapi setidaknya dia mengakui ada perbedaan mendasar dalam sistem masyarakat Islam dengan yang lainnya, di mana agama Islam begitu berpengaruh mewarnai gaya hidup dan cara pandang masyarakat. Termasuk masalah konsistensi nilai. Islam memiliki konsep dan visi dalam mewujudkan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh masyarakat, Syariat Islam menaruh perhatian untuk meningkatkan produktivitas. (Nida Humaida, Miftahul Aula Sa’adah, Huriyah 2020:135)

Selanjutnya konsep *ummah* dalam Islam juga memiliki batasan dan asas yang berbeda dengan *society* Barat. Jika syarat sebuah kelompok disebut *society* adalah asas *interest* untuk *self maintenance and self perpetuation* sebagaimana yang dikatakan Fairchild sebelumnya, maka umat memiliki alasan tersendiri untuk berkumpul, bukan sekedar menjaga kelestarian kehidupan, tetapi juga menjaga agama. Ini yang disebut Hayatullah Laluddin sebagai sosiologi Islam juga mengurus aspek internal, bukan eksternal materi semata. (Hayatullah Laluddin 2014:18)

Perbedaan asas ini juga berpengaruh pada batasan konsep *society* dan umat. Berbeda dengan batas dari *society* yang selalu berubah tergantung pendekatan mana yang dipakai, maka umat justru hadir dengan meniadakan batasan-batasan tersebut. *Umma is also said to denote the different units which form a community, and can consequently imply a people, a society, a nation, a tribe, a culture, a multi-social, a multi-cultural community in the sense it is used to describe Muslim civilization.* (Merryl Wyn Davies n.d.:138) Ungkap Davies. Baik itu komunitas, negara bahkan peradaban termasuk dalam kategori umat. Cakupannya lebih luas daripada *society* dengan Islam sebagai asasnya.

Abdalati, menjabarkan lebih lengkap daripada Hodgshon mengenai cakupan dan asas fondasi dari umat. Sebagaimana yang dikutip Jamil Farooqi, Ia menyatakan:

“Konsep Masyarakat dalam Islam itu tidak didasarkan pada ras, kebangsaan, lokalitas, pekerjaan, kekerabatan, atau persilangan khusus. (Ahmad, Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma 2021) Nama Islam tidak berada di belakang nama pemimpin atau pendiri atau pencipta. Ia melampaui batas negara dan batas politik. Landasan masyarakat dalam Islam adalah prinsip yang menunjukkan ketundukan pada kehendak Allah, ketaatan pada hukumnya dan komitmen pada tujuannya.

Singkatnya, umat Islam hanya hadir jika dipelihara dan dibina oleh Islam itu sendiri (*The community in islam is not founded on race, nationality, locality, occupation, kinship, or special intersts. it does not take its name after the name of a leader or a founder or an event. it transcends national borders and political boundaries. the foundation of the community in Islam is the principle which designates submission to the will of Allah, obedience to his law and commitment to his cause. in short, an islamic community is present only when it is nourished and fostered by Islam*). (Jamil Farooqi dalam Mohd Yusof Hussain 2009:161)

Bahkan menurut al-Attas, sejatinya asas umat dalam agama Islam sudah jauh-jauh hari ditentukan sebelum manusia lahir ke dunia. Ia menarik kesimpulan dari surat al-'Araf 172 dengan mengatakan tujuan terciptanya masyarakat adalah untuk memenuhi kesepakatan asali tentang menyembah Allah. (Mohammad Muslih, Fachri Koerudin 2022) Masyarakat, tidak hanya dimaknai sekedar perjanjian antar manusia untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi justru untuk memenuhi perjanjian antar manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, bagi al-Attas, konsep umat dalam Islam berakar sejak zaman *alastu* dengan asas memenuhi kewajiban atas perjanjiannya baik secara individu maupun komunal sehingga menghasilkan ikatan yang lebih kuat melampaui sekat-sekat teritorial. Tentang hal ini, ia mengatakan:

....And since the covenant pertained at once to the individual soul as well as to the souls collectively, so we see that here when manifested as man within the fold of Islam the same souls are united in their endeavour to fulfill the covenant collectively as society and community (*ummah*) as well as individually in such wise that islam is, as we have said, both personal and subjective as well as social and communal and objective; it is harmonious blending of both the individual as well as the society. That which unites one muslim individual to another in a wonderous and unique bond of brotherhood which transcends the restricting limitations of race and nation and space and time and is much stronger than even the familial bond of kinship is none other than this covenant recognize each other brothers as kindred souls. (Syed Muhammad Naquib Al-Attas 1995:63)

Dari konsep-konsep di atas kita dapat melihat ada asas yang berbeda antara *society* dan *umat* dimana masyarakat tidak hanya dikaji dan dimaknai perkumpulan atas kepentingan bersifat material saja, tetapi juga perkumpulan untuk memenuhi perjanjian dengan Tuhannya. Selain itu, ikatan umat yang kuat berasaskan agama, mampu melampaui batas-batas teritori, hal yang tidak ditemukan dalam konsep *society*. (Ryan Arief Rahman, Rodhi Hakiki Bin Cecep Mustopa, M. Dhiaul Fikri, Amir Reza Kusuma 2021)

Terakhir terkait perubahan masyarakat, secara teknis Ibnu Khaldun membaginya mengklasifikasikannya menjadi dua, yakni *badawah* dan *hadharah*. Point pertama merujuk pada tipe masyarakat yang tinggal di pedalaman seperti masyarakat desa atau badui yang sering tinggal di puncak gunung dan daerah gurun. Sedangkan point kedua mengacu pada masyarakat yang menjadi tolak ukur sebuah peradaban yakni masyarakat kota. (Khaldun 1988:152) Tipologi seperti ini menurut Ibnu Khaldun juga memiliki implikasi pada karakter dari masing-masing tempat. Seperti masyarakat *badawah* lebih pemberani dari masyarakat *hadharah*. (Khaldun 1988:155) Jika suatu saat orang-orang kota diserang, maka kemungkinan besar akan

kalah karena hidup mereka yang lebih individualistis. Akhirnya terjadi anarki dan kekacauan. Pada tahap ini, proses kekacauan akan menghasilkan kehancuran peradaban dan berjalan melalui masa transisi dari kehidupan nomaden menuju kehidupan yang urban. (Osman Raliby 1965:234–38) Ini yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun sebagai perubahan sosial dalam satu masyarakat.

Lebih lanjut, Ibnu Khaldun juga membaca implikasi transformasi sosial dalam artian *high* politik dengan membagi generasi masyarakat serta hubungannya dengan kerajaan tersebut menjadi tiga. *Pertama*, generasi pembangun yaitu generasi yang masih memegang sifat-sifat kenegaraan. Artinya mereka peduli *Kedua*, generasi penikmat yaitu generasi yang terbuai secara ekonomi dan politik dari sistem kekuasaan sehingga tidak peka lagi terhadap kepentingan bangsa dan negara. *Ketiga*, generasi apatis, yaitu generasi yang mereka yang sama sekali tidak peduli terhadap negara. Generasi ini, menurut Ibnu Khaldun merupakan generasi yang kekurangan *ashabiah* dan menyebabkan sebuah masyarakat akan hancur. (Osman Raliby 1965:238)

Dalam pandangannya terhadap masyarakat, memang Ibnu Khaldun memberi titik tekan bahwa sejarah merupakan sebuah ungkapan tentang perkumpulan manusia yang struktur peradaban dunia (*umran*) yang terorganisasi. (Anthony Black 2001:316) Dalam hal ini, menurut Fuad Baali, Ibnu Khaldun sama posisinya dengan Comte ataupun Durkheim tentang manusia akan selalu berkelompok untuk menunjukkan eksistensi dirinya dan *society* merupakan sumber utama terbentuknya nilai-nilai paling tinggi sebuah peradaban yang dapat mengangkatnya dan membedakannya dari perkumpulan hewan. (Fuad Baali 2001:29) Menarik jika mencermati apa yang dilakukan Fuad Baali pencarian keseragaman antara teori-teori sosiologi kontemporer dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun beberapa abad lalu. Terutama ketika menjabarkan tentang tipologi sosial dimana Ia membaginya menjadi *hadhara* dan *badawa*. (Fuad Baali 2001:100)

Akan tetapi yang menjadi masalah adalah, perubahan masyarakat bukan sekedar berbicara tentang hal-hal material. Apabila perubahan masyarakat bertujuan untuk kelangsungan hidup yang bermakna, maka perhatian penelitian bukan sekedar masalah fiksikal saja, tetapi juga aspek-aspek spiritual. Kritik seperti ini dikemukakan oleh Jamil Farooqi ketika Ia berkata:

“Social transformation is, no doubt, necessary for the overall well-being of human beings and their adequate, meaningful and comfortable survival on earth. it should develop human potentialities and facilitate peaceful, harmonious and purposive existence... Sociologists, in the wake of material progress, only concentrate on physical and material well-being devoid of spiritual and moral development. they stress freedom, individualization and economic progress. the transformation of social order in one or the other ways rotates around these principles. the mayor purpose is to gravity human needs in the best possible way” (Jamil Farooqi dalam Mohd Yusof Hussain 2009:148)

Dalam pandangan Jamil, makna perubahan masyarakat dalam pandangan Barat telah gagal sejak dalam konsepsinya. (Mohammad Muslih, Ryan Arief Rahman and Abdul Rohman 2021) Oleh karena itu, Ia menawarkan dan menjelaskan

bagaimana sebenarnya transformasi masyarakat dalam pandangan Islam, di mana lebih komprehensif ketika menjelaskan makna perubahan. Ia mengatakan

Social transformation in islam is a broad comprehensive and holistic concept. it includes all dimensions of human nature with the ascendancy of the moral one. material comfort and development cannot transform the human condition and deliver good to society unless supplemented by ethical and moral values and virtues. life is not to exist in this world as one wishes, but to live in a distinct way prescribed by the devine order to achieve the purpose of human existence.(Jamil Farooqi dalam Mohd Yusof Hussain 2009:168)

Lalu apa dari dampak dari cara pandang yang salah tentang masyarakat? Menarik jika melihat penjabaran al-Attas yang memberikan catatan tentang seluruh kekacauan dan problem identitas kemanusiaan Barat saat ini karena konsepsi masyarakat modern yang nilai-nilai terus berubah sampai tak berujung. Ia mengatakan: *The problem of human identity and destiny is, to my mind, the root cause of all other problems that based modern society*(Syed Muhammad Naquib Al-Attas 1995:84) Lebih lanjut Ia mencontohkan kehilangan identitas diri dalam kategori perubahan usia individu dalam masyarakat. Baginya, ada *gap* atau kesenjangan antara tiga kategori individu yakni golongan belia, golongan setengah umur, dan golongan tua.(Syed Muhammad Naquib Al-Attas 2001:92)

Al-Attas menjelaskan, dalam stuktur masyarakat, kategori golongan belia menuntut hak kebebasan untuk memilih nasibnya sendiri karena asas kebebasan sudah melekat dalam cara pandang mereka. Hal itu juga disebabkan golongan tua tidak bisa memberikan teladan karena kebermaknaan hidup hanya berlaku untuk usia setengah umur. Efeknya, ini kemudian menimbulkan keraguan terhadap masa depan golongan belia. Sedangkan golongan setengah umur, sebagai mana kata al-Attas, mereka sadar bahwa nilai-nilai ketika remaja dulu sama sekali tidak memberi panduan. Maka mereka juga tak dapat memberi contoh berperilaku hingga akhirnya membiarkan generasi belia bebas dengan harapan dapat menemukan nilai yang lebih sempurna dari mereka.(Syed Muhammad Naquib Al-Attas 2001:93) Ketiganya, baik tua, setengah umur dan belia terus menerus untuk mencari jawaban atas makna diri. Ini akibat dari konsep masyarakat modern yang hanya memperhatikan masalah fisik semata.

Pada akhirnya, di dalam konsep umat, juga memiliki makna perubahan dan sama sekali tidak menafikan teori perubahan sosial yang muncul atas penelitian fakta sosial. Tetapi perubahan itu mesti di dasari oleh sesuatu yang tetap dengan melibatkan seluruh aspek dalam masyarakat. Ibnu Khaldun memang menjelaskan teori perubahan masyarakat yang didasarkan pada fenomena masyarakat saat itu lalu mengembangkan teori *ashabiah* dengan tipologi *badawa* dan *‘umran*. Tetapi dalam sejarah Islam, lalu-lalang perubahan fisik tidak merubah aspek utama dari umat yaitu nilai dan cara pandang Islam yang tetap sama di tiap generasi. Mungkin, ini yang dimaksud al-Attas dengan “perubahan Islam bukan ke-menjadi-an (yang tidak pernah berhenti), tetapi gerak-daya yang menuju ke arah dasar Islam yang tulen.”(Syed Muhammad Naquib Al-Attas 2001:89) Ada perbedaan paradigma tentang perubahan dalam konsepsi umat dan society. Umat, menghendaki dinamika dalam stabilitas (*dynamic in stabilization*) dan dalam ke-jadi-an (*being*), sedangkan

society bermakna perubahan yang terus mencari bentuk dan tak pernah mencapai final atau ke-menjadi-an (*becoming*).

KESIMPULAN

Jika barat memiliki konsep *society* sebagai basis dari pengembangan ilmu sosiologi, maka Islam memiliki konsep umat yang menjadi acuan untuk memang sudah ada semenjak agama itu lahir. Tentu ada perbedaan mendasar antara *society* dan *ummat*, meski itu bukan berarti menafikan beberapa titik persamaan antara kedua konsep tersebut.

Penulis mengambil tiga variabel sebagai objek pembahasan, yakni nilai, asas-batas teritori dan makna perubahan. *Society* memiliki nilai yang didasarkan pada kesepakatan masyarakat untuk membentuk norma dan aturan sebagai penjaga stabilitas, sedangkan *ummat* tentu tidak menafikan kesepakatan, tetapi itu bukan yang utama karena agama Islam memiliki syariat yang mengatur seluruh pola hidup manusia. Itu, menjadi timbangan kesepakatan dari manusia.

Sedangkan dari segi asas, berbeda dengan *society* yang berasaskan kepentingan untuk mempertahankan kehidupan, konsep *ummat* justru lebih jauh dari itu ketika perkumpulan mereka bukan sekedar berdasarkan kepentingan material-fisikal semata, tetapi untuk saling memenuhi perjanjian sejak zaman alastu. Oleh karena itu asas dari *ummat* adalah keimanan dan ketauhidan pada Allah sang pencipta. Ini mempengaruhi cakupan dari *ummat* di mana '*ashabiyyah*' yang menyatukan mereka adalah agama, bukan batas-batas teritorial, ras, ataupun kepentingan material semata.

Terakhir dari segi perubahan. *Ummat* memang akan selalu berubah. Adanya teori *badawa* dan *hadarah* dari Ibnu Khaldun menunjukan hal itu. Tetapi yang menjadi titik tekan adalah, konsep *ummat* tidak berubah secara total, tetapi berubah dalam ketetapan. Selain itu, perubahan *ummat* merupakan perubahan untuk mencapai satu tujuan. Berbeda hal nya dengan *society* yang benar-benar berubah sepenuhnya sesuai dengan lingkungan, semangat jaman, ras, wilayah dan sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ibad, Shahib bin. n.d. *Al-Muhith Fi Al-Lughah*, (Maktabah Syamilah), Vol. 2.
- Ahmad, Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. 2021. "MELACAK MAKNA WORLDVIEW: STUDI KOMPARATIF WORLDVIEW BARAT, KRISTEN, DAN ISLAM." *Kanz Philosophia* Vol. 7(No. 1). doi: <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i1>.
- Ahmad Suhelmi. 2007. *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat Dan Kekuasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anthony Black. 2001. *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi.
- Ar-Raghib Al-Asfahani. 1412. *Al-Mufradat Fi Gharibil Alfadzil Quran* Vol. 1, 86. Damaskus: Darul Qalam.
- Armando Salvatore. 2016. *The Sociology of Islam; Knowledge Power and Civility*. UK:

- Jhon Wiley & Sons Ltd.
- Bagong Suyanto. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Budi F Hardiman. 2015. *Seni Memahami*. Yogyakarta: Kanisius.
- David Copp. 1992. "The Concept of a Society." *Jurnal Dialogue* XXXI(1):185.
- Denise L. Carmody dan T.L Brink. 2014. *Ways to The Center; An Introduction to World Religions*. USA: Boston.
- Elly M Setiadi. 2006. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Elly M Setiadi dkk. 2015. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Etc, Pip Jones. 2016. *Pengantar Teori-Teori Sosial, Terj. Achmad Fedyani*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Fakhruddin ar-Razi. 1420. *Mafatihul Ghaib, Vol. 6*. Beirut: Dar Ihya Turats al-'Arabi.
- Fuad Baali. 2001. *Society, State and Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought*. USA: State University of New York Press.
- Happy Susanto. 2014. "Konsep Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial Dan Relevansinya Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan." *Muaddib* 04(02):97-107.
- Hayatullah Laluddin. 2014. "Conception of Society and Its Characteristics From an Islamic Perspective Dalam International." *Jurnal of Islamic Thought* Vol. 6(Desember).
- Herabudin. 2015. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibnu Atsir al-Jazari. 1979. *An-Nihayah Fi Gharibil Hadits Wal Atsar*. Beirut: al-Maktabah al-'Alamiyah.
- Ibnu Mandzur. 1414. *Lisanul 'Arab Vol 12*. Beirut: Dar ash-Shadr.
- Ibrahim A Ragab. 1999. "On The Methodology of Islamizing Social Sciences." *Jurnal Intellectual Discourse* 7,(1):27-52.
- Ilyas Ba Yunus dan Farid Ahmad. 1991. *Sosiologi Islam Dan Masyarakat Modern, Terj. Hamid Basyaib*. Bandung: Mizan.
- Jamil Farooqi dalam Mohd Yusof Hussain. 2009. *Islamization of Human Science*. Malaysia: IIUM press.
- Jhon M. Morse etc. 2004. *Merriam Webster Dictionary*. USA.
- Kartasapoetra dan Hartini. 2007. *Kamus Sosiologi Pendudukan*. Jakarta: PT Bumi Akasara.
- Khaldun, Ibnu. 1988. *Diwan Muftadi' Fi Tarikh Al-'Arabi Wa Al-Barbari Wa Min 'Ashirahum Min Dzawi Sya'Ni Al-Akbari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Leon H Mayhew. 1968. "Society" *Dalam International Encyclopedia of the Social Sciences*. New York: Macmillan.
- Mark Jensen. 2011. *Civil Society in Liberal Democracy*. London: Routledge.
- Merryl Wyn Davies. n.d. *Soumen Mukherjee, Ismailism and Islam in Modern South Asia*. Cambridge: Cambridge Unity Press.
- Mohammad Muslih, Fachri Koerudin, Amir Reza Kusuma. 2022. "TELAH PROBLEM HADIS PERSPEKTIF SEKULER: SEBUAH PENGANTAR." *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* Vol. 5(1). doi: DOI: <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.245>.
- Mohammad Muslih, Ryan Arief Rahman, Amir Reza Kusuma, and Adib Fattah

- Suntoro Abdul Rohman. 2021. "Mengurai Disrupsi Paham Keislaman Indonesia Dalam Perspektif Tipologi Epistemologi Abid Al- Jabiri." *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 6(2):125–35. doi: DOI :10.15575/jaqfi.v6i2.14028.
- Mohammad Taqdir. 2018. "Potret Kerukunan Berbasis Kearifan Lokal: Implementasi Nilai-Nilai Harmoni Dalam Ungkapan 'Rampak Naong Bringen Korong' Dalam Kehidupan Masyarakat Madura". *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 16(1):80. doi: DOI: 10.18592/khazanah.v16i1.2057.
- Mudji Sutrisno dkk. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhammad Hedayatul Islam dan Fadzli Adam. 2019. "Islamization of Family and Society: Study of Bangladesh Jema'at El-Islami." *Proceedings of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management* (23-24 November):85.
- Muhammad Rasyid Ridha. 1990. *Tafsir Al-Manar Vol. 4*. Mesir: Haiyah al-Mishriyyah al-Amah lil Kitab.
- Mujiburrahman. 2017. "Urgensi Memahami Banua Melalui Kajian Sosiologi Agama." *Jurnal: Khazanah: Stud Islam Dan Humaniora* XV(1):55. doi: <http://dx.doi.org/10.18592/khazanah.v15i1.1483>.
- Muslih, Muhammad. 2016. *Filsafat Ilmu Kajian Atas Asumsi Dasar, Paradigma Dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, Cet. Ketujuh*. Yogyakarta: Lesfi.
- Nevitt Sanford. 1966. *Self and Society*. New York: Atherton Press.
- Nida Humaida, Miftahul Aula Sa'adah, Huriyah, Najminnur Hasanatun Nida. 2020. "Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Dalam Perspektif Islam." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18(1):135. doi: DOI: 10.18592/khazanah.v18i1.3483.
- Osman Raliby. 1965. *Ibnu Chaldun: Tentang Masyarakat Dan Negara*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ryan Arief Rahman, Rodhi Hakiki Bin Cecep Mustopa, M. Dhiaul Fikri, Amir Reza Kusuma, Abdul Rohman. 2021. "DISKURSUS FENOMENOLOGI AGAMA DALAM STUDI AGAMA-AGAMA." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 16(2):147–78. doi: DOI: <https://doi.org/10.24042/ajsla.v16i2.9853>.
- See Hoon Peow. 2010. "Islamisation of Knowledge: Islamic Sociology and Anthropology in Theory and Practice." *As-Shajarah ISTAC International Islamic University Malaysia* 15(1):94.
- Shiddiq Amien dkk. 2005. *Panduan Hidup Berjama'ah*. Bandung: Tafakkur.
- Sulfan Akilah Mahmud. 2018. "Konsep Masyarakat Menurut Murthada Muthahhari; Sebuah Kajian Filsafat Sosial." *Jurnal Aqidah* IV(2):272.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas. 1995. *Prolegomena to the Methaphsics of Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas. 2001. *Risalah Untuk Kaum Muslim*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Talcott Parson. 1966. *Societies: Evolutionary and Comparative Perspevtives*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- William Outhwaite. 2002. *Ensiklopedia Pemikiran Sosial Modern, Terj. Tri Wibowo Vol. 1*. Jakarta: Kencana.